EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SISTEM ZONASI BAGI SISWA RAWAN MELANJUTKAN PENDIDIKAN

The Effectiveness of New Student Admission of Zoning System Policy for Students Prone to Continue Education

Dian Purwanti ¹⁾, Ira Irawati ²⁾, Josy Adiwisastra³⁾

¹ Administrasi Publik,Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Jawa Barat Indonesia

<u>Purwantidian75@yahoo.com</u>

²FISIP,Universitas Padjadjaran Bandung, Jawa Barat, Indonesia

<u>Ira_Irawati@unpad.ac.id</u>

³FISIP, Universitas Padjadjaran Bandung, Jawa Barat, Indonesia

ABSTRAK

Penerimaan Peserta Didik Baru yang familiar dengan akronim PPDB adalah kegiatan rutin tahunan yang merupakan tahap seleksi bagi calon peserta didik baru yang diselenggarakan oleh panitia tingkat Sekolah dibawah pengawasan dan koordinasi Dinas Pendidikan. Kebijakan PPDB sistem zonasi kota Bandung mengusung asas objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Melalui sistem zonasi pemerintah kota Bandung berharap semua warga kota Bandung bisa mendapatkan layanan pendidikan yang lokasinya dekat dengan tempat tinggal, sehingga lebih hemat waktu, lebih hemat biaya transportasi, kondisi peserta didik lebih bugar, mengurangi kemacetan, dan terjadi pemerataan pendidikan. Pada proses implementasi kebijakan sistem zonasi tahun ajaran 2018/2019, semua SMP Negeri terpenuhi kuotanya dan menampung 90% calon siswa yang domisilinya dekat dengan sekolah. Adapun yang menjadi permasalahan adalah sistem ini tidak efektif untuk mengurangi angka tidak melanjutkan sekolah bagi anak-anak dari kalangan RMP. Dengan metode uji beda vektor rata-rata butir indikator, penelitian ini mencoba mengevaluasi efektivitas kebijakan sistem zonasi yang diimplementasikan pada tahun 2017 dan 2018. Sehingga dapat diketahui kebijakan sistem zonasi terbukti dapat meningkatkan angka partisipasi kasar dari siswa RMP, namun tidak efektif dalam mengurangi angka tidak melanjutkan sekolah bagi anak-anak RMP, karena faktanya tidak semua anak RMP berdomisili di dekat sekolah. Berdasarkan hal tersebut peneliti merekomendasikan agar Dinas Pendidikan memastikan proses yang dilakukan tepat sasaran.

Kata kunci: Efektivitas, Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru, Sistem Zonasi

A. PENDAHULUAN

Penerimaan Peserta Didik Baru yang familiar akronim **PPDB** dengan adalah penerimaan peserta didik untuk jenjang taman kanak-kanak, sekolah dasar dan menengah pertama yang dilaksanakan pada awal tahun pelajaran baru. PPDB jenjang SMP dilakukan secara online, prioritasnya adalah anak usia 12-15 tahun. Seleksi dilakukan melalui sistem zonasi. PPDB kota Bandung mengusung transparan, objektif, akuntabel, berkeadilan.

Dalam implementasinya sejak tahun ajaran 2017/2018 kota Bandung telah menerapkan sistem zonasi, yaitu sistem penerimaan peserta didik berdasarkan radius dan jarak. Melalui sistem zonasi ini diharapkan semua warga kota Bandung bisa mendapatkan pendidikan yang lokasinya dekat dengan tempat tinggal. Tidak terkecuali anak-anak dari kalangan RMP (rawan melanjutkan pendidikan) yang memiliki

kelemahan ekonomi, dapat secara agar melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah menengah. Kelebihan sistem zonasi ini menurut Dinas Pendidikan adalah pemerataan pendidikan, lebih hemat waktu karena sekolah dekat, lebih hemat biaya transportasi, kondisi peserta didik lebih bugar, serta mengurangi kemacetan. Namun dalam implementasinya kebijakan PPDB di kota Bandung selalu menuai konflik dan protes dari masyarakat yang merasa dirugikan, masyarakat yang mendaftarkan anaknya ke SMP maupun penyelenggara pendidikannya, yaitu guru SMP Negeri dan Swasta.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan referensi dari jurnal penelitian terkait PPDB di berbagai kota di Indonesia yang pernah dilakukan, data sekunder dari pihak dinas pendidikan kota Bandung, serta data primer yang diperoleh langsung dari para narasumber yang peneliti wawancarai, Sementara proses analisisnya menggunakan uji dua vektor rata-rata berdasarkan sampel dependen.

B. KAJIAN TEORI

Beberapa teori terkait efektivitas mengemukakan bahwaEfektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya.

Georgopolous dan Tannembaum (1985:50), mengemukakan: "Efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan, dimana keberhasilan suatu organisasi harus mempertimbangkan bukan saja sasaran organisasi tetapi juga mekanisme mempertahankan diri dalam mengejar sasaran. Dengan kata lain, penilaian efektivitas harus berkaitan dengan masalah sasaran maupun tujuan.

Selanjutnya Steers (1985:87) mengemukakan bahwa "Efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya".

Upaya mengevaluasi proses implementasi kebijakan sistem zonasi dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen penerimaan peserta didik baru sistem zonasi atau tidak.

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh Siagian (1978:77), sebagai berikut:

a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan agar panitia **PPDB** dalam melaksanakan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan Dinas Pendidikan menerapkan sistem zonasi dapat tercapai. b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah "on the track" yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementor tidak tersesat dalam pencapaian tujuan kebijakan sistem zonasi. c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional. d. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang harus dikerjakan oleh Dinas Pendidikan dimasa depan. e. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja. f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan Dinas Pendidikan. oleh Pelaksanaan efektif dan vang bagaimanapun baiknya kebijakan sistem zonasi apabila tidak diimplementasikan secara efektif dan efisien maka Dinas Pendidikan tidak akan mencapai sasarannya. karena melalui implementasi kebijakan, organisasi semakin didekatkan pada tujuannya. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik, mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pula pengendalian. Begitu dalam proses implementasi kebijakan sistem zonasi.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian kuantitatif dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang bertujuan untuk mencari faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab tidak efektifnya implementasi kebijakan PPDB SMP di kota Bandung. Adapun jenis penelitian kuantitatif yang akan digunakan adalah jenis penelitian survey dimana data lapangan difokuskan pada model korelasional dan akan dihimpun dari sejumlah responden yang jumlahnya ditentukan melalui sampel atas populasi (Singarimbun dalam Singarimbun dan Efendi, 1995:3)

Dalam penelitian ini indikator-indikator dari dimensi-dimensi tidak merupakan indikator reflektif melainkan merupakan indikator formatif, sehingga untuk mengevaluasi kualitas pengukuran tidak menggunakan uji validitas dan reliabilitas secara tradisional. Karenanya dalam penelitian ini, kualitas pengukuran dievaluasi melalui Analisis Komponen Utama (Johnson & Wichern, 2007). Dalam hal ini, ukuran-ukuran statistik yang dipergunakan untuk mengevaluasi model pengukuran formatif adalah relevansi indikator (Hair dkk., 2014;132).

Relevansi indikator formatif dilihat dari signifikansi koefisien bobot komponen utama. Koefisien bobot yang signifikan menunjukkan dimensi tersebut relevan. Pengujian mengikuti prosedur pengujian koefisien bobot komponen utama di dalam Johnson & Wichern (2007).

Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan statistik uji:

$$F = \frac{(n-p)n}{(n-1)p} \overline{\mathbf{d}}' \mathbf{S}_{\mathbf{d}}^{-1} \overline{\mathbf{d}} \sim F_{(p,n-p)}$$

jika hasil uji rata-rata semua vector signifikan dilanjutkan dengan uji vector menggunakan rumus Statistik uji sebagai berikut:

$$t_{j} = \frac{\bar{d}_{j}}{\sqrt{\frac{s_{j}^{2}}{n}}} \sim t_{n-1}$$

Kriteria uji pada taraf signifikansi

$$\alpha_{:\text{``tolak}} H_0$$
Jika

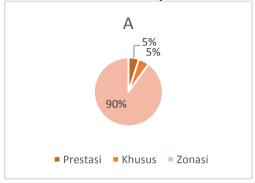
$$nilai - p = 2P(t_{n-1} \ge |t|) \le \frac{\alpha}{p}$$
,

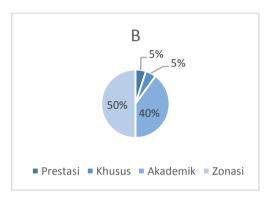
D. HASIL DAN PEMBAHASAN

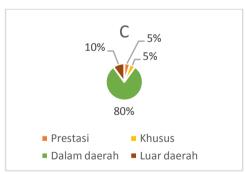
Kebijakan zonasi adalah sistem penerimaan peserta didik berdasarkan radius dan jarak. Melalui sistem zonasi diharapkan semua warga kota Bandung bisa mendapatkan pendidikan yang lokasinya dekat dengan tempat tinggal. Kelebihan dari sistem zonasi ini diantaranya adalah pemerataan pendidikan, lebih hemat waktu karena sekolah dekat, lebih hemat biaya transportasi, kondisi peserta didik lebih bugar, serta mengurangi kemacetan.

Berbeda dengan proses penerimaan peserta didik baru tahun 2017, pada tahun 2018 ini dinas pendidikan Bandung membuat kota pengelompokan sekolah menjadi tiga kelompok, pertama kelompok A untuk sekolah yang berlokasi di dalam kota, di tengah pemukiman warga, dikenai aturan zonasi 90% termasuk calon siswa dari kalangan RMP (rawan melanjutkan pendidikan) yang sebelumnya dikenal dengan istilah siswa miskin, kelompok A terdiri dari 36 sekolah; kedua kelompok B untuk sekolah yang berlokasi di dalam kota namun jauh dari pemukiman warga karena berada di kawasan perkantoran, untuk sekolah di kelompok B ini dikenai aturan zonasi bertahap, yaitu 50% zonasi dan 40% akademik, ada 5 sekolah yang masuk kedalam kelompok ini; dan yang ketiga kelompok C untuk sekolah yang lokasinya berbatasan dengan wilayah kabupaten, untuk kelompok C ini dikenai aturan zonasi perbatasan, yaitu 80% berasal dari dalam daerah kota Bandung dan 10% dari luar daerah kota Bandung, terdapat 16 sekolah yang masuk ke dalam kelompok C.Dinas Pendidikan kota Bandung pada implementasi kebijakan PPDB

sistem zonasi tahun ajaran 2018/2019 membagi SMP Negeri ke dalam tiga kelompok, dimana kelompok A terdiri dari sekolah-sekolah yang dikenai aturan 90% zonasi termasuk siswa RMP. Kelompok B terdiri dari lima sekolah favorit yang berada dikawasan perkantoran dan dikenai aturan zonasi bertahap, yaitu 50% zonasi 40% akademik. Selanjutnya kelompok C yaitu sekolah yang letaknya di perbatasan kota sehingga dikenai aturan zonasi perbatasan, dimana 80% siswa berasal dari dalam daerah, 10% dari luar daerah. Berikut ini tabel datanya:







Gambar 4.1 Tabel Persentase Kuota PPDB SMP, tahun 2018.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan terhadap dimensi ketepatan sasaran. Diperoleh data sebagai berikut :

Indikator	rata- rata beda	varia ns beda	nilai-t	nilai-p	alpha/ p	Signifik ansi
Dukungan agen pelaksana	0.246	1.224	0.281	0.7801	0.0050	non-sig.
Kesesuaian tindakan	0.281	1.491	1.735	0.0882	0.0071	non-sig.
Meningkatny a APK RMP	0.053	1.408	0.335	0.7390	0.0071	non-sig.
Mendekatka n sekolah dengan domisili siswa	0.632	1.701	3.656	0.0006	0.0071	sig.
Mengubah persepsi sekolah favorit	-0.105	2.096	0.549	0.5852	0.0071	non-sig.
Menurunkan angka tidak melanjutkan sekolah	-0.702	1.570	4.228	0.0001	0.0071	sig.

Sumber: Hasil penelitian tahun 2018

	20	17	2018	
Indikator	Rata-rata	Simp. Baku	Rata- rata	Simp. Baku
X1	4,11	0,90	4,35	0,67
X2	3,68	0,95	3,96	0,87
X3	3,79	0,88	3,84	0,88
X4	3,21	0,92	3,84	0,80
X5	3,67	0,91	3,05	1,09
X6	3,09	0,83	2,98	1,03

Sumber: Hasil penelitian tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat bahwa untuk dimensi ketepatan sasaran terdapat empat indikator yang menunjukkan peningkatan pada implementasi kebijakan tahun ajaran 2018/2019 meskipun nilainya tidak signifikan, yaitu indikator dukungan agen pelaksana, hal ini terkonfirmasi saat penelitian bahwa sudah menjadi sifat birokrat patuh dan taat pada pimpinan. Karenanya walaupun hati nurani para (panitia PPDB) menyatakan penolakan, dalam implementasinya panitia PPDB tetap melaksanakan apa yang menjadi keputusan Dinas Pendidikan selaku organisasi induknya. Indikator selanjutnya adalah kesesuaian tindakan, sebagaimana telah dijelaskan pada indikator pertama panitia PPDB yang menjadi pelaksana di tingkat sekolah selalu berusaha melakukan tindakan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan karena adanya pengawasan dari Dinas.Pada indikator meningkatnya RMP,terkonfirmasi saat penelitian lapangan bahwa dengan sistem zonasi murni otomatis seleksi kemampuan akademik calon siswa tergeser oleh zona. Dibukanya kran radius tempat tinggal terdekat ke sekolah membuat siswa yang domisilinya di sekitar sekoah dapat masuk tanpa seleksi akademik ke sekolah terdekat. Sisi positifnya, anak-anak yang rawan melanjutkan pendidikan namun domisilinya dekat dengan sekolah otomatis dapat diterima di sekolah terdekat, sehingga dalam tanda kutip Angka Partisipasi Kasar dari siswa RMP meningkat. Mengapa tanda kutip ? karena belum ada data yang pasti mengenai kebenaran siswa RMP 100% melanjutkan sekolah, faktanya surat keterangan miskin masih bisa dibuat oleh masyarakat yang mampu secara ekonomi bahkan orang tua siswa yang memiliki jabatan dan kewenangan untuk menekan aparat demi meluluskan keinginan putra-putrinya masuk ke sekolah favorit tanpa tes, tidak sedikit masyarakat yang "cerdas" dan dekat dengan pusat kekuasaan melakukan tindakan curang dengan menitipkan putra-putrinya kepada famili yang domisilinya dengan sekolah diinginkan. dekat yang Selanjutnya untuk indikator mendekatkan sekolah dengan domisili siswa, sudah pasti mengalami peningkatan, karena pada sistem zonasi murni kali ini 90% siswa yang diterima adalah siswa yang domisilinya dekat dengan sekolah. Kriteria utama kedekatan domisili dengan sekolah inilah yang menjadi pertentangan kalangan masyarakat maupun panitia pelaksana. Karena dengan kriteria ini prestasi akademik siswa menjadi kurang dihargai, akhirnya masyarakat berfikir tidak perlu giat belajar untuk masuk ke sekolah favorit, cukup mengontrak rumah di dekat sekolah agar dapat diterima di sekolah favorit.

Selain keempat indikator yang mengalami hasil penelitian menunjukkan peningkatan, adanya dua indikator yang mengalami penurunan, yaitu indikator mengubah persepsi sekolah favorit dan menurunkan angka tidak melanjutkan sekolah. Data hasil penelitian menunjukkan adanya penurunan nilai, yang maknanya bahwa implementasi kebijakan sistem zonasi tahun 2018/2019 belum mampu merubah persepsi masyarakat terhadap keberadaan sekolah favorit meskipun menurut Humas Pendidikan Kota Bandung semua sekolah sudah standar nasional namun sesuai kenyataannya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kualitas sekolah masih belum berubah. Keinginan Dinas Pendidikan merubah persepsi masyarakat terhadap keberadaan sekolah favorit ternyata tidak didukung oleh kebijakan yang dibuatnya. Setidaknya hal ini terkonfirmasi saat peneliti melakukan penelitian lapangan, ironinya

sistem PPDB kota Bandung tahun 2018/2019 justru secara tegas mengelompokkan sekolah ke dalam 3 kelompok A,B,C, dimana kelompok B dihuni oleh sekolah-sekolah yang difavoritkan oleh masyarakat dengan sistem seleksi yang berbeda dengan sistem seleksi yang digunakan untuk sekolah yang ada di kelompok A dan C. Kebijakan sistem zonasi tahun ajaran 2018/2019 juga tidak menjamin menurunnya angka tidak melanjutkan sekolah. Hal ini terkonfirmasi saat peneliti melakukan wawancara kepada panitia **PPDB** dan warga kota Bandung yang bahwa menvatakan sistem zonasi tahun 2018/2019 ini mengakibatkan anak-anak yang kurang mampu secara ekonomi namun unggul dalam prestasi tidak dapat diterima di SMP Negeri manapun karena radius tempat tinggalnya jauh dari lokasi sekolah, sementara kuota sekolah terdekat sudah penuh terisi.

E. SIMPULAN

Berdasarkan data hasil penelitian yang peneliti lakukan terhadap kebijakan sistem zonasi yang diimplementasikan pada tahun ajaran 2017/208 dan tahun ajaran 2018/2019 diperoleh hasil bahwa implementasi kebijakan sistem zonasi tahun 2018/2019jika diukur dari indikator dukungan agen pelaksana, kesesuaian tindakan, meningkatnya APK RMP, dan mendekatkan sekolah dengan domisili siswa lebih efektif dibandingkan dengan implementasi kebijakan sistem zonasi tahun 2017/2018. Namun tidak efektif jika diukur dari indikator mengubah persepsi masyarakat terhadap sekolah favorit dan menurunkan angka tidak melanjutkan sekolah.

Adanya campur tangan politik dalam proses implementasi kebijakan telah membuat kegiatan penerimaan peserta didik baru tingkat SMP dikota Bandung selalu menuai konflik.

Terlepas dari dampak negatif yang ditimbulkan, harus diakui bahwa jika ditinjau dari segi ketepatan sasaran, implementasi kebijakan sistem zonasi pada tahun 2018/2019 lebih efektif jika dibandingkan dengan implementasi kebijakan pada tahun ajaran 2017/2018. Artinya walaupun tidak signifikan harus diakui ada upaya dari pemerintah kota Bandung untuk memperbaiki kebijakan sebelumnya, walaupun hasilnya tidak sesuai harapan.

F. REKOMENDASI

Berdasarkan data hasil penelitian yang dilakukan secara komparatif terhadap kebijakan sistem zonasi yang diimplementasikan pada tahun ajaran 2017/2018 dan tahun ajaran 2018/2019, peneliti memberikan rekomendasi sebagai berikut:

- 1. Perbaiki kualitas sekolah agar sesuai dengan standar nasional, sehingga masyarakat tidak perlu bingung memilih sekolah favorit jika semua sekolah kualitasnya sama.
- Merubah kebijakan idealnya melalui proses evaluasi, sehingga kebijakan baru memperbaiki dan menyempurnakan kekurangan dari kebijakan lama dan bukan menimbulkan masalah baru.
- Tetapkan sasaran yang hendak dicapai dan pastikan proses yang dilakukan tepat pada sasaran.

REFERENSI

Buku

- Anderson, J.E. 1979. *Public Policy Making: An Introduction*,. Bostn: Houghton Miffin Company.
- Baedhowi. 2009. Kebijakan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan: Konsep Dasar dan Implementasi. Semarang: Pelita Insani
- Creswell, John W. 1994. Reseach Design: Qualitative & Quantitative Approaches. California: Sage Publication.
- Dunn, William N.1994. *Public Policy Analysis: An Introduction*, New Jersey: Prentice-Hall Inc.
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho. 2004. *Kebijakan Publik Formulasi*, *Implementasi*, *Dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia.
- Grindle, Merilee., 1980., "Polities and Policy Implementation In The Third World., New Jersey: Princestown Univercity Press.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisys*. Yogyakarta: Gava Media
- Islamy, İrfan. 2002. *prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Jones, Charles O. 1984. *An Introduction To The Study Of Public Policy*. Monterey. California: Brooks/Cole Publishing Company.
- Lane, E.J. 1993. *The Public Sector: Concepts, Models, And Approaches*, London, Sage Publication.
- Lilik Ekowati, Mas Roro. *Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Atau Program.* Pustaka Cakra. Surakarta.2004.
- Mazmanian, D.A. & Paul. A. Sabatier. 1983. *Implementation and Public Policy*. London: Scott, Forestnan and Company.
- Meter, Donald Van dan Carl Van Horn. 1975.

 The Policy Implementation, Process, A
 Conceptual Frame Work Dalam
 Administration and Society 6, 1975. London
 Sage Publications.

- Nugroho.D. Riant. 2009, *Kebijakan Publik Formulasi*, *Implementasi Dan Evaluasi*. PT.Elex Media Komputindo Kelompk Gramedia, Jakarta.
- Pressman, Jeffrey L and Wildavsky Aaron. 1978. Implementation, Dalam Shafritz, Jay M and Hyde, Albert C. Classic Of Public Administration. Callifornia: Brooks/cole Publishing Company.
- Purwanto,E Agus dan Sulistyastuti, D Ratih. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media
- Sabatier, Paul A. 1993. Top-Down And Bottom-Up Approaches To Implementation Research. Dalam Hill Micheal. The Policy Process: A Reader. Hlm 266-293. Hertfordshire. Haruester Wheatsheaf.
- Supranto, J. 2004. *Analisis Multivariat*. Rineka Cipta. Jakarta
- Wahab, Solichin Abdul. 2002. Analisis Kebijaksanaan Dan Formulasi Implementasi Kebijaksanaan Negara. Bumi Aksara. Jakarta.
- Wibawa, Samudra. Yuyun Purbokusumo. Agus Pramusinto. 1994. "Evaluasi Kebijakan Publik". Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Winarno, Budi. 2002. *Prosedur dan Proses Kebijakan Publik*. Media Pressindo. Yogyakarta.

Jurnal:

- Ardhi,Mohammad.2015."Evaluasi Manajemen Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Real Time Online Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta"
- Becker, Rosa. 2012. "International Student Recruitment: Policies and Developments in Selected Countries"
- Borchert, Michael.2002." Career Choice Factors of High School Students"
- Dadson, Richard L.2015. "An Analysis of The Relationship Between State Education Quality and Principal Preparation Practices"
- Fitz, John. 2015" Implementation Research and Education Policy: Practice and Prospects"
- Flannery, K.Brigid.2016 "Implementation of SWPBIS in High School"
- Fumasoli, Tatiana. 2013." Organizational Studies in Higher Education: A Reflection on Historical Theme and Prospective Trends"
- Levy, Daniel C. 2013 "The Decline of Private Higher Education"
- Lin, Shufang etc.2016. "An Empirical Study of Institutional Research in A Senior High School"

- Locke, William. 2009. "Evidence Based Policy In Practice In National and Intrnational Contexts"
- Marbun.H.E.B.2014."Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Untuk Golongan Keluarga Miskin (GAKIN) Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Balikpapan"
- Moja, Teboho.2000."Nigeria Education Sector Analysis: An Aanlytical Syntesis of Performance and Main Issues"
- Mowen, Thomas J.2014." Punishment in School: The Role of School Security Measures"
- Mulford,Bill.2003."School

 Leaders: Challennging Rolesand Impact on
 Teacher and School Efectiveness"
- Matland.E.Richard.1995. "Synthesizing the Implementation Literature: The Ambiguity-Conflict Model of Policy Implementation" Journal of Public Administration Research and Theory: J-PART, Vol. 5, No. 2 (Apr.,1995), pp. 145-174
- Stavrou, Sophia.2016."Pedagogising in University: On Higher Education Policy Implementation and its Effects on Social Relations "
- Sopianto Basofi.2015."Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online Tingkat Sekolah Menengah Atas Di Kota Pekanbaru Tahun 2011-2013"
- Stephan, Sharon. 2014." School Mental Health: The Impact of State and Local Cpacity Building Training"
- Tansel, Aysit.2013."Supplementary Education in Turkey: Recent Developments and Future Prospects"
- Kuo, Yu-Ying. 2012 "Taiwan's Public Policy Education: US-Style"
- Wang, Zhenmin.2007. "Key Factors That Influence Recruiting Young Chinese Student"

Peraturan:

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan
- Peraturan Walikota Bandung Nomor 610 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Di Kota Bandung
- Peraturan Walikota Bandung Nomor 553 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Di Kota Bandung
- Peraturan Walikota Bandung Nomor 456 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Di Kota Bandung

TENTANG PENULIS

¹ Dian Purwanti, S.Sos., M.AP adalah dosen Universitas Muhammadiyah Sukabumi, yang sedang menempuh Program Doktor di Pascasarjana FISIP Universitas Padjajaran.

² Dr. Dra. Hj. Ira Irawati, M.Si adalah dosen

Program Pascasarjana **FISIP** Universitas Padjadjaran Bandung merupakan yang Promotor dari penulis¹.

³Prof. Dr. Drs. H. Josy Adiwisastra, M.S adalah dosen Program Pascasarjana FISIP Universitas Padjadjaran Bandung yang merupakan co Promotor dari penulis¹.